

**EKSISTENSI GURU
DALAM TRANSFORMASI
PENDIDIKAN**

EKSISTENSI GURU DALAM TRANSFORMASI PENDIDIKAN

James Marpaung
Sri Mulyati
Agusriansyah
Mutanto
Poniso Suryo Renggono
Fatma Dewi
Wulan Dwi Miharni



LADANG KATA

EKSISTENSI GURU DALAM TRANSFORMASI PENDIDIKAN

©2022,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

vi + 86 hlm; 14,5 x 20,5 cm

Cetakan Pertama, Juli 2022

Penulis :

James Marpaung

Sri Mulyati

Agusriansyah

Mutanto

Poniso Suryo Renggono

Fatma Dewi

Wulan Dwi Miharni

Tata Letak Isi :

Rasyid Hidayat

Desain Sampul :

Diterbitkan oleh:

Lembaga Ladang Kata

Jl. Garuda, Gang Panji 1, No. 335

RT 7 RW 40 Kampung Kepanjen, Banguntapan, Bantul

Email: cetakbukudiladangkata@gmail.com

Instagram: [@cetakbuku.ladangkata](https://www.instagram.com/cetakbuku.ladangkata)

www.cetakbukumurah.id

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Puji Syukur ke Hadirat Ilahi Robbi atas curahan kasih yang senantiasa menyelimuti hidup ini. Dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis yang terdiri dari teman seperjuangan; James Marpaung, Sri Mulyati, Agusriansyah, Mutanto, Poniso Suryo Renggono, Fatma Dewi dan Wulan Dwi Miharni. Kami adalah mahasiswa Program Doktorat Manajemen Pendidikan Universitas Mulawarman Angkatan 2021. Alhamdulillah atas kuasa Allah SWT kami mampu menyelesaikan karya yang bertajuk “ **Eksistensi Guru dalam Transformasi Pendidikan**”

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada yang terhormat **Prof. Dr. Muhammad Bahri Arifin, M.Hum** selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi yang telah memberikan arahan, bimbingan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami serta bagi upaya transformasi pendidikan di masa yang akan datang.

Semoga buku sederhana ini dapat memberikan manfaat serta memberi arti dan menjadi sumber inspirasi. Amiin

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Samarinda, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vi
1. Peranan Pendidik sebagai Salah Satu Komponen Pendidikan Nasional di Era Society 5.0	1
<i>James Marpaung</i>	
2. Urgensi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dalam Mendukung Program Merdeka Belajar	10
<i>Sri Mulyati</i>	
3. Guru Penggerak.....	21
<i>Agusriansyah</i>	
4. Pengembangan Kompetensi Profesionalisme Guru di Era Digital di Abad 21.....	32
<i>Mutanto</i>	
5. Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia pada Sekolah Negeri dan Swasta.....	46
<i>Poniso Suryo Renggono</i>	
6. Pengelolaan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	58
<i>Fatma Dewi</i>	
7. Komponen Pendidikan Nasional (Pendidik/Guru)	73
<i>Wulan Dwi Miharni</i>	

PERANAN PENDIDIK SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN PENDIDIKAN NASIONAL DI ERA SOCIETY 5.0

James Marpaung

Pendidik sebagai salah satu komponen pendidikan nasional yang memiliki peranan penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Seknun menyatakan bahwa “pendidik sebagai guru merupakan seorang yang harus bisa digugu dan ditiru. Digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua muridnya. Segala ilmu pengetahuan yang datangnya dari sang guru dijadikan sebagai suatu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan atau diteliti lagi. Ditiru artinya menjadi suri teladan dan panutan bagi muridnya, mulai dan cara berpikir, cara berbicara hingga cara berperilaku sehari-hari. Dengan demikian, guru memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan.” (Seknun, 2012). Guru adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para peserta didik dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, serta membuka komunikasi dengan masyarakat. Guru dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, harus dapat menyampaikan materi dengan baik karena belajar merupakan suatu proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku yang baru pada diri seseorang sebagai hasil dari interaksinya dengan beragam informasi dan lingkungan. Guru harus dapat menyampaikan informasi yang diketahuinya dengan benar dan tepat sasaran, yaitu konten materi yang benar melalui kegiatan pedagogis yang baik. Hal ini menyebabkan sebuah sudut pandang bahwa seseorang yang berkecimpung dalam pendidikan khususnya pendidik harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Tuntutan terhadap kepribadian seorang pendidik inilah kadang-kadang dirasakan lebih berat dibandingkan profesi lainnya.

Salah satu faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran adalah guru. Hal ini dikarenakan adanya ketetapan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 8 tentang guru dan dosen bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru dalam undang-undang tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Djuanda (2019) mengatakan bahwa “kepemilikan empat kompetensi tersebut, yaitu pedagogik, kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional diharapkan dapat mewujudkan suatu kondisi yang

memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan peran sebagai pendidik profesional yang akuntabel dan bermartabat.” (Pembelajaran, 2019)

Berbicara tentang dunia pendidikan, tidak terlepas dari pelaku pendidikan itu sendiri, yaitu guru. Guru merupakan subyek utama yang merancang kegiatan pembelajaran. Kreatifitas guru sangat diperlukan oleh peserta didik dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Guru kreatif menggunakan segala sesuatu yang dia miliki untuk mengaktualisasikan pembelajaran aktif untuk memotivasi peserta didik seperti pemikiran, fakta dan ide-ide atau bahkan kombinasi pemikiran.

Menghadapi era society 5.0, banyak tantangan dan perubahan yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan karena gerbang utama dalam mempersiapkan SDM unggul adalah lembaga satuan pendidikan. Era super smart society (society 5.0) sendiri diperkenalkan oleh Pemerintah Jepang pada tahun 2019, yang dibuat sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0, yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu (VUCA). (Jepang Menjelang '5, n.d.). Dikhawatirkan invansi tersebut dapat menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang dipertahankan selama ini.

Pada tanggal 21 Januari Pada tanggal 21 Januari 2019, secara mengejutkan Kantor PM Jepang meluncurkan roadmap yang lebih humanis, dikenal dengan super-smart society atau society 5.0. yaitu tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologisecara mengejutkan Kantor PM Jepang meluncurkan roadmap yang lebih humanis, dikenal dengan

super-smart society atau society 5.0., yang merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Apabila kita kembali pada masa lalu, sebagai catatan society 5.0 didahului dengan era berburu (society 1.0), pertanian (2.0), industri (3.0) dan teknologi informasi (4.0). Melalui society 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala aspek kehidupan. Dan hal ini diharapkan akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan masyarakat. Dalam society 5.0 ditekankan perlu adanya keseimbangan pencapaian segala aspek kehidupan dengan penyelesaian problem sosial, terutama aspek ekonomi dan pendidikan. (Sabri, 2019)

Dalam menghadapi era society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Selain pendidikan beberapa elemen dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan seluruh masyarakat juga turut andil dalam menyambut era *society 5.0* mendatang. Dwi Nurani memaparkan dalam seminarnya bahwa “Untuk menghadapi era society 5.0 ini satuan pendidikan pun dibutuhkan adanya perubahan paradigma pendidikan. Diantaranya pendidik meminimalkan peran sebagai *learning material provider*, pendidik menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik. Pendidik berperan sebagai fasilitator, tutor, penginspirasi dan pembelajar sejati yang memotivasi peserta didik untuk “Merdeka Belajar”. (Artikel Menyiapkan Pendidik Profesional Di Era Society 5, n.d.). Ia juga menyampaikan merdeka belajar akan menciptakan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui peningkatan layanan dan akses pendidikan dasar salah satunya

adalah upaya pemenuhan maupun perbaikan infrastruktur dan platform teknologi di sekolah dasar. Pendidikan nasional berbasis teknologi dan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menciptakan sekolah dan ataupun kelas masa depan. Merdeka belajar juga dapat dimaknai dengan kebijakan strategis baik pemerintah maupun swasta dalam mendukung implementasi merdeka belajar, prosedur akreditasi yang dapat beradaptasi, sesuai kebutuhan organisasi/lembaga/sekolah, serta pendanaan pendidikan yang efektif dan akuntabel salahsatunya ditandai dengan otonomi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Melaksanakan merdeka belajar diperlukan manajemen tata kelola dari semua unsur, baik pemerintah daerah, swasta, kepala sekolah, guru dan masyarakat. Melalui manajemen berbasis sekolah diperlukan jiwa kepemimpinan seorang kepala sekolah yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya. Untuk peningkatan sumber daya manusia, baik guru maupun kepala sekolah, diperlukan pembinaan baik lokal maupun internasional yang berkelanjutan sehingga mampu menjawab tantangan dunia industry atau menghadapi era revolusi industry 4.0 dan society 5.0.

Dalam menghadapi era society ada dua hal yang harus dilakukan yaitu adaptasi dan kompetensi. Beradaptasi dengan Society 5.0, Dwi Nurani menegaskan kita perlu mengetahui perkembangan generasi (mengenal generasi). Istilah *baby boomers* yang dimaksud adalah tinggi tingkat kelahiran dari beberapa generasi mulai dari generasi x sampai dengan generasi x dimana

terjadi transformasi peradaban manusia. Untuk menjawab tantangan Revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 dalam dunia pendidikan diperlukan kecakapan hidup abad 21 atau lebih dikenal dengan istilah 4C (Creativity, Critical Thinking, Communication, Collaboration). Diharapkan guru menjadi pribadi yang kreatif, mampu mengajar, mendidik, menginspirasi serta menjadi suri teladan”.

Sementara itu di abad 21 kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa ini adalah memiliki kemampuan 6 Literasi Dasar (literasi numerasi, literasi sains, literasi informasi, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan). Tidak hanya literasi dasar namun juga memiliki kompetensi lainnya yaitu mampu berpikir kritis, bernalar, kreatif, berkomunikasi, kolaborasi serta memiliki kemampuan problem solving. Dan yang terpenting memiliki perilaku (karakter) yang mencerminkan profil pelajar pancasila seperti rasa ingin tahu, inisiatif, kegigihan, mudah beradaptasi memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kepedulian sosial dan budaya.

Menghasilkan SDM unggul dengan beradaptasi di era society 5.0., peserta didik harus diimbangi dengan penguatan profil pelajar pancasila. Dimana penguatan nilai pancasila terhadap peserta didik ini dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan ko kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan lingkungan sekolah, pemberdayaan budaya masyarakat. Society 5.0. adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti *Internet on Things* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial Intelligence* (kecerdasan

buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi.

Terjadi perubahan pendidikan di abad 20 dan 21. Pada 20th Century Education pendidikan fokus pada anak informasi yang bersumber dari buku, serta cenderung berfokus pada wilayah lokal dan nasional. Sementara era 21th Century Education, fokus pada segala usia bahwa setiap anak merupakan di komunitas pembelajar, pembelajarannya diperoleh dari berbagai macam sumber, bukan hanya dari buku saja, tetapi bias dari internet, berbagai macam platform teknologi & informasi serta perkembangan kurikulum secara global, di Indonesia dimaknai dengan merdeka belajar. Dalam menghadapi era society 5.0. ini dibutuhkan kemampuan 6 literasi dasar seperti literasi data yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (*big data*) di dunia digital. Kemudian literasi teknologi, memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, machine learning, engineering principles, biotech*). Dan terakhir adalah literasi manusia yaitu *humanities*, komunikasi, & desain.

Royani mengatakan bahwa “sebagai pendidik di era society 5.0, para guru harus memiliki keterampilan dibidang digital dan berpikir kreatif. Guru di era society 5.0 dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas. Pola peningkatan kompetensi guru yang bersifat bottom up perlu dilakukan agar setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi seorang guru dapat diakomodir untuk dikaji bersama. Dalam hal ini, peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP) perlu dioptimalkan dan upaya pemberdayaan KKG dan MGMP hendaknya dilakukan secara kontinyu sehingga tercipta suatu kolaborasi yang berorientasi pada pengembangan diri guru dalam menghadapi revolusi industry 5.0.” (Royani, 2020)

Ada tiga hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era society 5.0. diantaranya *Internet of things* pada dunia Pendidikan (*IoT*), *Virtual/Augmented reality* dalam dunia pendidikan, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam dunia pendidikan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pendidik juga harus memiliki kecakapan hidup abad 21 yaitu memiliki kemampuan *leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, team working* dan *problem solving*. Fokus keahlian bidang pendidikan abad 21 saat ini dikenal dengan 4C yang meliputi *creativity, critical thinking, communication dan collaboration*. (Sabri, 2019)

Tenaga pendidik di abad society 5.0 ini harus menjadi guru penggerak yang mengutamakan peserta didik dibandingkan dirinya, inisiatif untuk melakukan perubahan pada peserta didik, mengambil tindakan tanpa disuruh, terus berinovasi serta keberpihakan kepada peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel Menyiapkan Pendidik Profesional Di Era Society 5.* (n.d.).
Jepang Menjelang '5. (n.d.).
Pembelajaran, M. (2019). *No Title*. I(2), 353–372.

- Royani, I. (2020). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 449–456.
- Sabri, I. (2019). *Peran Pendidikan Seni Di Era Society 5 . 0 untuk Revolusi*.
- Seknun, M. Y. (2012). Kedudukan Guru Sebagai Pendidik. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 15(1), 120–131. <https://doi.org/10.24252/lp.2012v15n1a10>

URGENSI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) DALAM MENDUKUNG PROGRAM MERDEKA BELAJAR

Sri Mulyati

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian semua siswa diharapkan dapat mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya. PKB mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan dimana guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan awal sebagai guru. Beberapa hasil pelatihan guru yang diadakan direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan utamanya pelatihan atau bimtek tingkat nasional sebagian besar materinya diarahkan ke Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi

guru. Hal ini membuktikan bahwa PKB sangat penting untuk diimplementasikan di dunia pendidikan khususnya di satuan pendidikan berbagai level. Ini juga yang mendorong penulis untuk mempublikasikannya melalui media komunikasi ini.

Melalui kesadaran untuk memenuhi standar kompetensi profesinya serta upaya untuk memperbaharui dan meningkatkan kompetensi profesional selama periode bekerja sebagai guru, PKB dilakukan dengan komitmen secara holistik terhadap struktur keterampilan dan kompetensi pribadi atau bagian penting dari kompetensi profesional. Dalam hal ini adalah suatu komitmen untuk menjadi profesional dengan memenuhi standar kompetensi profesinya, selalu memperbaruinya, dan secara berkelanjutan untuk terus berkembang. PKB merupakan kunci untuk mengoptimalkan kesempatan pengembangan karir baik saat ini maupun ke depan. Untuk itu, PKB harus mendorong dan mendukung perubahan khususnya di dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru. PKB tidak terjadi secara *ad-hoc* tetapi dilakukan melalui pendekatan yang diawali dengan perencanaan untuk mencapai standar kompetensi profesi (khususnya bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja, atau dengan kata lain berkinerja rendah), mempertahankan/menjaga dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. PKB dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan merupakan tanggung-jawab guru secara individu sesuai dengan masyarakat pembelajar, jadi sangat penting bagi guru yang berada di ujung paling depan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. PKB mencakup tiga komponen yaitu:

Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran/pembimbingan termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah. Kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan professional. Diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan dan/atau meningkatkan keprofesian untuk memiliki kompetensi di atas standar kompetensi profesi dalam *kurun waktu* tertentu. Sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar atau di atas standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan.

Untuk keperluan pemberian angka kredit pada diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru, bukti fisik yang harus disertakan adalah sebagai berikut: (1). Fotokopi surat tugas dari kepala sekolah atau instansi lain yang terkait, yang telah disahkan

oleh kepala sekolah; (2) Fotokopi sertifikat diklat yang disahkan oleh kepala sekolah; (3) Laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan, diketik dan dijilid serta disajikan dengan kerangka isi meliputi bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir yaitu lampiran, berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat. Tambahan kegiatan kolektif guru yang pelaksanaannya di kelompok/ musyawarah guru (KKG, MGMP, KKKS, MKKS), sertifikat diberikan satu kali dalam satu tahun sesuai dengan tahun ajaran di akhir pelaksanaan pertemuan kegiatan rutin kelompok/ musyawarah kerja guru. Sertifikat sebagai bukti keikutsertaan kegiatan di kelompok/musyawarah guru ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/provinsi atas usulan Ketua Kelompok/ Musyawarah Kerja sebagaimana dalam penjelasan buku 4 pedoman kegiatan PKB.

Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan, yaitu: (1) presentasi pada forum ilmiah; sebagai pemrasaran/nara sumber pada seminar, lokakarya ilmiah, koloqium atau diskusi ilmiah; (2) publikasi ilmiah hasil penelitian misalnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) meliputi masalah yang dihadapi guru (dalam interaksi pembelajaran, berkaitan dengan prestasi belajar, disiplin belajar) ,gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal misalnya tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran

pada satuan pendidikan yang dimuat di media massa/jurnal; (3) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru.

Karya Inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini mencakup: (1). penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks dan/atau sederhana; (2). penemuan/peciptaan atau pengembangan ; (3). pembuatan/pemodifikasian alat pelajaran/peraga/-praktikum kategori kompleks dan/ atau sederhana;(4). penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

Contoh Bukti Fisik yang harus dilampirkan pada alat peraga :(1). Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat peraga yang dilengkapi dengan gambar/foto alat peraga tersebut bila alat peraga tidak memungkinkan untuk dikirim; (2). Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat peraga yang dilengkapi dengan alat peraga yang dibuat bila alat peraga tersebut memungkinkan untuk dikirim;(3) Lembar pengesahan/ Pernyataan dari Kepala Sekolah/madrasah bahwa alat peraga tersebut dipergunakan di sekolah/madrasah. Sedangkan besaran angka kredit alat peraga yaitu : (1) Kategori kompleks, diberi angka kredit 2; (2) Kategori sederhana, diberi angka kredit 1; (3) Angka kredit diberikan setiap kali menghasilkan alat peraga dan dapat dilakukan oleh perorangan atau tim.

Pelaksanaan PKB harus dapat mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut : (a) PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik;(b). Setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri yang perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan;(c) Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; (d). Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; (e).Cakupan materi untuk kegiatan PKB harus terfokus pada pembelajaran peserta didik, kaya dengan materi akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, dan teknologi dan/atau seni; (f). Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri; (g).PKB yang baik harus berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan/atau kabupaten/kota;(h). Sedapat mungkin kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau dengan sekolah di sekitarnya (misalnya di gugus KKG atau MGMP) ;(i). PKB harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa.

Berdasarkan refleksi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan

yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya segala potensi yang ada pada diri anak agar dapat berkembang secara optimal. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik (kurang berkualitas) dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta 'tangan dingin' pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal.

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, tentunya dibutuhkan sumber daya guru yang professional. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru baik pedagogik maupun profesional dalam melaksanakan tugas profesinya, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya, maka guru harus mengembangkan potensi melalui kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan agar tidak tertinggal dengan perubahan paradigma pendidikan yang dinamis.

Salah satu indikator cetusan Mas Menteri tentang Merdeka Belajar adalah disaat peserta didik harus berada di rumah dan

mengikuti pembelajaran secara tidak biasanya. Komunikasi peserta didik menjadi terbatas karena jumlah pertemuan tatap muka berkurang. Meski alternatif komunikasi melalui digital atau online, tetap saja hal ini berpengaruh terhadap komunikasi sosial peserta didik. Keluhan demi keluhan dari masyarakat pun bermunculan. Teknologi yang digunakan terasa kurang familiar bagi sebagian masyarakat, pembelajaran tidak maksimal, koneksi internet pada sebagian daerah masih memiliki kendala jaringan. Belum lagi, penyampaian materi secara online bagi sebagian peserta didik menjadi momentum yang dimanfaatkan untuk bermain tanpa harus takut dengan pengawasan guru di kelas.

Jika ditelisik lebih dalam, merdeka belajar dapat berarti pembetulan kemandirian peserta didik dalam proses belajar dan kemerdekaan lingkungan Pendidikan dalam menentukan proses pembelajaran. Dengan kata lain, konsep merdeka belajar adalah pemberian kebebasan bagi satuan pendidikan, guru-guru dan muridnya dalam melakukan eksplorasi dalam belajar. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Salah satu tantangan merdeka belajar adalah memunculkan kreativitas pendidik dalam memberikan materi pelajaran yang mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Kemampuan guru diuji berpikir kreatif dan mampu memanfaatkan teknologi meski sarana dan prasarana masih terbatas. Hal ini tentunya membawa perubahan positif dimana pendidik harus berupaya meningkatkan sumber dayanya menciptakan metode belajar yang efektif serta mendesain kurikulum berbasis kompetensi.

Dengan adanya perubahan yang positif ini diharapkan adanya pergerakan yang signifikan terhadap perubahan pendidikan di

Indonesia. Kita sadari bahwa sebaik apapun teknologi pendidikan, kurikulum, infrastruktur yang ada di satuan Pendidikan, tetap tidak bisa menggantikan peran guru. Untuk itulah, melalui Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) akan lahir pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berkakhlak mulia, berkebhinekaan yang global, mandiri, kreatif, gotong royong dan berpikir kritis.

Program Guru Penggerak adalah salah satu bentuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang dipersiapkan bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Konsep Program Pendidikan Guru Penggerak adalah pemberian ruang dan waktu bagi guru untuk melakukan inovasi yang muaranya memberikan hal terbaik bagi peserta didik. Pendidikan guru penggerak dilakukan dengan pendekatan andragogi dan berbasis pengalaman, untuk itulah proses kepemimpinan sangat penting dimiliki oleh guru penggerak sebagai pioner perubahan. PPGP merupakan episode ke empat dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wahana bagi guru dalam mengembangkan diri dan berkolaborasi dengan guru lain secara mandiri. Guru penggerak dibentuk untuk memiliki kematangan moral, emosi serta spiritual sehingga memiliki perilaku sesuai dengan kode etik dan menjadi teladan bagi sekitarnya.

Kunci kesuksesan pendidikan adalah bagaimana guru mampu mengubah paradigma serta mentransformasi pembelajaran yang merdeka bagi peserta didik. Pada titik inilah konsep merdeka belajar diterapkan oleh guru penggerak. Prinsipnya adalah guru akan mengajar dengan merdeka tanpa tekanan dan diberikan kemerdekaan dalam mengelola pembelajaran. Begitu pula kebebasan berpikir bagi peserta didik terhadap persepsi pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu (peserta didik) baik potensi fisik maupun potensi cipta, rasa, maupun karsanya agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya tanpa ada paksaan, bebas bereksplorasi dan merdeka dalam belajar. Pencapaian proses dan hasil belajar siswa agar optimal maka diperlukan guru yang mau bergerak dan berorientasi pada siswa serta melakukan transformasi pendidikan di masa yang akan datang.

Bedasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa implementasi PKB sangat penting untuk mendorong guru dalam memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan mencakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai profesi. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya serta membangun kualitas pribadi yang dibutuhkan di dalam kehidupan profesionalnya, Melalui PKB ini diharapkan dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya itu.

Dengan demikian, guru akan terampil membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh untuk mampu berkompetitif di abad 21. Semoga tulisan ini dapat membawa manfaat sekaligus dapat menjadi acuan bagi individu maupun institusi yang terkait dalam rangka memfasilitasi guru di dalam kegiatan PKB dengan membaca kembali penjelasan buku 1 tentang pedoman pengelolaan PKB dan buku 4 tentang pedoman kegiatan PKB.

DAFTAR PUSTAKA

- HE Mulyasa. (2021). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Jakarta
- Muliadi. (2018). *Pentingnya Impelementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru*. Sulewesi Selatan.
- Dirjen GTK. (2016). *Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru* (buku 1-5). Jakarta

GURU PENGGERAK

Agusriansyah

Pendidikan merupakan proses memfasilitasi pembelajaran, atau perolehan pengetahuan, keterampilan, nilai, moral, kepercayaan, dan kebiasaan (Suardi, M., 2018; Hodson, D., 2009). Melalui pendidikan orang dapat memiliki pemahaman terhadap sesuatu yang membuat dirinya menjadi manusia yang kritis dalam berpikir dan bertindak. Ukuran keberhasilan pendidikan dilihat dari keterlibatan dan peran serta guru sebagai pendidik, siswa sebagai peserta didik, materi pembelajaran yang diberikan, metode pengajaran dan sarana prasarana yang disediakan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang baru, Nadiem Makarim, sejak menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan merdeka belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, “Merdeka Belajar” atau “Kebebasan Belajar”. Konsep “Kebebasan Belajar”, yaitu membebaskan institusi pendidikan dan mendorong peserta didik untuk berinovasi dan mendorong pemikiran kreatif. Konsep ini kemudian diterima mengingat visi misi Pendidikan Indonesia ke depan demi

terciptanya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing diberbagai bidang kehidupan.

Menghadapi era revolusi industry 4.0, yang menekankan konsep merdeka belajar, setiap lembaga pendidikan diharapkan memiliki daya saing dan inovasi yang mampu berkolaborasi supaya tidak mengalami ketertinggalan. Di era revolusi 4.0, sistem pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, kreatif dan inovatif serta memiliki ketrampilan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi (Yamin dan Syahrir, 2020).

Konsep merdeka belajar merupakan respons terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industry 4.0. Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan RI, sebagai mana yang dikutip oleh tempo. com 2019, menegaskan bahwa merdeka belajar merupakan kemerdekaan berfikir yang dimulai dari guru. Menurut Bell Hooks pada Osman, ahmed., and special akello (2015) mendidik sebagai praktik kebebasan adalah bentuk pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan mengasyikan bagi guru dan peserta didik. Dalam praktik kebebasan ini, kedua belah pihak sama-sama pemain dalam berkontribusi dan berbagi pengalaman belajar (Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S., 2019). Peserta didik tidak hanya diajarkan informasi yang mereka harapkan untuk diingat dan diingat ketika ditanya, sebaliknya mereka belajar untuk berpikir kritis dengan cara yang tidak konformis dan tidak terkekang. Guru yang mendidik sebagai praktik kebebasan mengajar tidak hanya untuk berbagi informasi tetapi untuk berbagi dalam pertumbuhan intelektual dan spiritual peserta didik.

Pembelajaran merdeka belajar menciptakan peserta didik tidak hanya pintar dalam menghafal pembelajaran tetapi memiliki analisa dan penalaran yang tajam dalam mengatasi suatu masalah. Peserta didik juga diharapkan mampu memiliki karakter. Dalam pembelajaran merdeka belajar guru harus memiliki kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran dan mengembangkannya secara mendalam menjadi materi yang menarik dan menyenangkan untuk didiskusikan dengan menggunakan teknologi sebagai media dalam pembelajaran, sehingga peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Daya cipta dan kreatif siswa akan tumbuh jika guru mampu mendesain pembelajaran yang menantang mereka untuk berkreasi secara aktif.

Pendidikan berpusat pada peserta didik dengan fokus pada pribadi peserta didik, pengalaman, perspektif, latar belakang, bakat, minat, kapasitas dan kebutuhan mereka pada pembelajaran. Dalam konteks ini, strategi pendidikan baru harus mendorong interaksi antara guru dan peserta didik. Praktik kreatif dalam pendidikan harus membantu peserta didik untuk bekerja membangun pengetahuan mereka melalui mendefinisikan hal-hal, yang sangat penting di mata mereka, dan dalam prosesnya, memperkuat rasa percaya diri dan individualitas Mereka juga melibatkan pengembangan kualitas pribadi peserta didik, termasuk rasa tanggung jawab yang kuat dalam diri sendiri dan orang lain.

Dengan perkembangan kebijakan pendidikan, tentu guru harus mampu untuk beradaptasi dengan kebijakan yang berlaku. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, Sebagai

tenaga profesional maka guru harus mampu menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu, yang dapat menghasilkan generasi yang terdidik, generasi yang mampu bersaing secara global dan memiliki moral yang baik (Murniarti, 2021). Guru harus mampu mengubah paradigma yang lama dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang baru. Dalam menghadapi era industry 4.0, guru harus mampu meng*Upgrade* dirinya dengan mengembangkan kompetensi pedagogiknya, sehingga mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk menggunakan daya nalarnya dengan baik. Guru yang memiliki kemerdekaan berpikir tentu mampu memberikan stimulus yang merangsang peserta didik untuk menggunakan daya nalarnya dengan baik dan memiliki daya cipta sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki.

Untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka bagi peserta didik, tentu guru harus mampu menggunakan daya kreatifnya dalam mendesain pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang ada. Proses pembelajaran akan menarik dan menyenangkan jika guru mampu mendesain pembelajaran dengan kreatif. Guru bisa memilih metode-metode yang cocok dengan menggunakan media pembelajaran untuk membantupeserta didik mampu mengerti dan memahami materi yang diajarkan. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dan penggunaan media pembelajaran yang tepat akan tercipta pembelajaran yang tidak monoton. Dengan demikian, tujuan dan kebijakan pemerintah tentang merdeka belajar akan tercapai dengan baik.

Fenomena yang terjadi bahwa masih banyak guru merasa bingung dan tidak terbiasa dengan penggunaan media pembelajaran. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran hanya metode caramah atau penugasan saja. Guru ibarat teko dan peserta didik sebagai gelas. Gurumemberi materi dan peserta didik hanya menunggu dengan pasif. Dalam hal ini pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik, namun pada guru. Proses pembelajaran yang seperti ini mengerdilkan daya pikir dan kreatifitas peserta didik, karena peserta didik tidak diberi kesempatan dalam mengekspresikan dirinya secara bebas dan merdeka. Dalam hal penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), selama ini masih ada beberapa guru hanya melakukan *copy paste*. Hal ini terjadi karena banyaknya komponen- komponen yang harus dimuat secara rinci dalam RPP sehingga banyak menghabiskan waktu, padahalguru harus melakukan proses pembelajaran.

Dalam program merdeka belajarguru harus memiliki pemikiran yang bebas dan merdeka dalam mendesain pembelajaran yang ada sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru memiliki kemerdekaan dalam memilih elemen-elemen dari kurikulum untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kebebasan yang dimiliki guru dalam memilih elemen-elemen yang ada dalam kurikulum harus mampu menciptakan pembelajaran yang menantang peserta didik untuk memiliki pemikiran yang kritis dalam memecahkan berbagai masalah yang ada, mampu menumbuhkan daya cipta yang kreatif serta memiliki karakter yang baik dalam menjalinkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain.

Maka untuk mewujudkan program merdeka belajar, pemerintah merekrut program guru penggerak dalam menggerakkan para guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam pembelajaran merdeka belajar. Maka artikel ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang guru penggerak dan perannya dalam merdeka belajar di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan pola pendidikan dengan Guru Penggerak dalam pembelajaran merdeka belajar. Guru penggerak dalam merdeka belajar merupakan seseorang yang mampu mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan dirinya secara menyeluruh, yang memiliki pemikiran yang kritis, dan daya cipta yang kreatif. Dalam pembelajaran merdeka belajar, guru penggerak harus mampu melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga pendidikan profil pelajar pancasila dapat terwujud dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Nadiem Makariem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menegaskan bahwa ujung tombak dari transformasi Pendidikan merdeka belajar adalah guru penggerak. Guru penggerak tak hanya mengikuti kurikulum yang ditentukan, melainkan, berupaya mengubah semua aktivitas belajar untuk mencapai atau menjaga standar Profil Pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, lebih kreatif, mampu bergotong royong, memiliki jiwa kebhinekaan yang global, berpikir kritis, serta memiliki kemandirian. Guru penggerak dalam pembelajaran harus mampu menyeimbangkan tuntutan zaman dalam era modern dalam hal pendidikan karakter sebagai dasar bagi peserta didik untuk tetap bijaksana dalam

menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang, dan memiliki sikap yang kritis dalam menanggapi segala informasi yang ada. Guru penggerak adalah guru yang menggerakkan guru yang lain dalam pembelajaran merdeka belajar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistic. Guru penggerak dalam merdeka belajar tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran secara efektif tetapi harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan peserta didik dalam komunitas persekolahan dengan menggunakan teknologi yang ada demi peningkatan mutu pembelajaran serta harus melakukan refleksi dan evaluasi terus menerus dalam perbaikan praktek pembelajaran yang terus menerus. Guru penggerak harus mampu menjadi teladan yang memiliki kemampuan dan daya juang untuk membawa suatu perubahan yang baik dalam ekosistem pendidikan dalam sekolahnya maupun dalam unit sekolah yang lain.

Sesuai dengan program menteri pendidikan dan kebudayaan tentang guru penggerak dalam merdeka belajar, diharapkan para gurumampu untuk bersinergidan berkolaborasi untuk mencapai perubahan pendidikan kearah yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dan memiliki daya saing. Guru penggerak harus mampu menggerakkan rekan guru yang lain untuk selalu berinovasi. Sebagai guru dalam Pendidikan merdeka belajar, tentu harus mampu memiliki kompetensi kepribadian yang matang, baik secara moral maupun dalam hal spiritual sehingga menjadi menjadi role model bagi peserta didik dan semua warga sekolah.

Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran dalam merdekabelajar yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan ekosistem pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan yang berpusatpadapesertadidik. Menjadigurupenggerak, harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan dan pelatihan selama sembilan bulan. Hasil yang diharapkan dari pelatihan atau pendidikan dari program guru penggerak adalah:

1. Guru memiliki kemampuan yang mandiri dan merdeka dalam mengembangkan kompetensinya sebagai pengajar sekaligus mampu menggerakkan rekan guru yang lain untuk mampu berinovasi dalam meningkatkan kualitas *output* dari Pendidikan.
2. Dalam pembelajaran merdeka belajar, guru harus mampu berpihak pada peserta didik. Guru harus mampu menggerakkan peserta didiknya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, untuk mencapai tujuan dari pendidikan sesuai dengan visi sekolah.
3. Guru harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam mengembangkan kualitas dari sekolahnya. Untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan sekolah, guru harus mampu menjalin kerja sama dengan orang tua dan komunitas sehingga bertumbuh sikap mandiri dan memiliki jiwa kepemimpinan.
4. Guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seorang guru diharapkan memiliki kematangan emosional, baik secara moral maupun spiritual dalam bersikap dan

bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kode etik yang berlaku di masyarakat.

5. Guru harus mampu mengelola pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik dengan menciptakan komunikasi yang baik dengan orang tua dari peserta didik

Revolusi industri 4.0 dan peradaban 5.0 telah memberikan pengaruh terhadap bidang kehidupan, sehingga terjadi disrupsi teknologi dan inovasi, termasuk dalam pendidikan. Guru menghadapi tantangan yang sangat besar di era disrupsi teknologi sekarang karena informasi dan sumber belajar sangat mudah diperoleh. Meskipun demikian tentu perangurutan tidak sepenuhnya dapat tergantikan oleh canggihnya teknologi, karena teknologi merupakan hasil dari otak manusia yang bisa salah dan keliru atau bisa disalah gunakan. Teknologi juga tidak bisa diteladani, karena tidak punya perasaan dan tidak punya empati.

Pendidikan selalu terjadi di rumah dan juga di sekolah. Di rumah orang tua adalah guru utama Pendidikan dan di sekolah Guru adalah pendidik utama. Maka benar yang dikatakannadiem Nadiem (2019) bahwa “ pendidikan merupakan apa yang terjadi di ruang kelas dan di rumah. Teknologi tidak mungkin menggantikan koneksi itu. Harus ada koneksi batin agar *trust* tercipta dan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif”. Maka secanggih apapun teknologi tidak dapat menggantikan peran guru karena sentuhan sang guru kepada peserta didik memiliki kekhasan yang tidak bisa diberikan oleh teknologi. Menghadapi pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, guru dituntut untuk terus belajar dan belajar dalam mengikuti perkembangan

teknologi supaya pengetahuan yang dimiliki terupdate dan tidak ketinggalan dari peserta didik dalam hal penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Dengan kemampuan yang dimiliki, guru harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam menggunakan teknologi dengan baik dan memiliki manfaat bagi proses pembelajaran. (Mulyasa, 2021:1-2)

Guru harus mampu mengembangkan dirinya dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Guru harus mampu menerima hal-hal baru dalam setiap perubahan yang ada dengan membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk siap menghadapi karakteristik kehidupan yang berbeda khususnya dalam menghadapi era industry 4.0. (Dadang dalam bandungkita.id 2020). Untuk menghadapi era industry 4.0 guru harus mampu mengubah pola pikirnya. Guru harus memiliki visi kedepan dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih bermutu. Untuk meningkatkan kualitas peserta didik, tentu salah satu yang paling dibutuhkan adalah kualitas guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik. Hanya guru yang memiliki kualitas yang tinggi mampu menciptakan peserta didik yang berkualitas tinggi pula. Tugas guru tidak sebatas mengajarkan materi kepada peserta didik namun harus mampu memberi teladan bagi yang lain sebagai pemimpin dalam pendidikan dimasa yang akan datang.

Guru penggerak tidak sebatas melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran, menyampaikan materi kepada peserta didik namun harus memiliki kemauan dan kemampuan dalam hal memimpin, berinovasi serta melakukan perubahan (Sirait, S., Murniarti, E., & Sihotang, H. ,2021). Guru penggerak merdeka belajar harus

mampu mengajar dan mengelola pembelajaran dengan efektif dengan menggunakan teknologi yang ada, mampu berbahasa Inggris untuk meningkatkan mutu pendidikan serta harus melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran terus menerus (Pendi, Y.O., 2020). Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki kemampuan untuk berkreasi secara inovatif dan dengan energi melayani peserta didik serta mampu membangun hubungan yang baik antara guru dan sekolah dengan komunitas yang lebih luas menjadi pembelajar sekaligus agen penggerak perubahan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU DI ERA DIGITAL DI ABAD 21

Mutanto

Pendahuluan

Era digital sudah begitu marak ditandai oleh makin luasnya jangkauan internet, namun demikian ada juga masyarakat yang masih belum terjangkau internet, dan bahkan masih berupa wilayah blank spot. Kondisi seperti itu berimplikasi terhadap perkembangan pelayanan pendidikan, sehingga juga berkonsekuensi terhadap karakteristik guru dan dan siswanya, meskipun sudah berada dalam abad 21.

Sekolah, guru, dan siswa di daerah perkotaan memang sudah terkoneksi jaringan internet, dan bahkan ada pula wilayah yang sama sekali belum terjangkau infrastruktur telekomunikasi. Akan tetapi pada abad 21 sekarang ini masyarakat Indonesia memang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dengan era digital. Karena itu, apa pun harus menyesuaikan dengan kehadiran era baru berbasis digital, sehingga bagaimana menjadi bagian dari era digital sekarang ini dengan memanfaatkan teknologi digital dan berjejaring ini secara produktif.

Menurut (Smalddino 2012) kemunculan masyarakat informasi itu ditandai dengan empat karakter dasar: Pertama, ada teknologi-teknologi yang bertindak berdasarkan informasi. Kedua, karena informasi adalah bagian dari seluruh kegiatan manusia, teknologi-teknologi itu mempunyai efek yang meresap. Ketiga, semua sistem yang menggunakan teknologi informasi didefinisikan oleh 'logika jaringan' yang memungkinkan mereka mempengaruhi suatu varietas luas proses-proses dan organisme-organisme. Keempat, teknologi-teknologi baru sangat fleksibel, memungkinkan mereka beradaptasi dan berubah secara terus-menerus. Akhirnya teknologi-teknologi spesifik yang diasosiasikan dengan informasi sedang bergabung menjadi suatu sistem yang sangat terintegrasi dalam upaya meningkatkan dan pengembangan kompetensi guru.

Pengembangan kompetensi guru landasan pijaknya adalah (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, n.d.) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Setiap kompetensi dapat diuraikan sebagai berikut; Kompetensi merupakan unjuk kerja (ability to do) yang dilatarbelakangi oleh penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hal ini mengandung makna bahwa kualitas unjuk kerja itu ditentukan oleh penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Semakin tinggi kualitas penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan, semakin tinggi pula unjuk kerjanya, dan sebaliknya. Jadi ada korelasi positif tinggi antara tingkat penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan kompetensi yang dibentuk. Kompetensi adalah seperangkat

penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan penampilan unjuk kerja sebagai guru secara tepat (Djumiran_dkk 2009).

Seorang guru yang professional harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi tersebut antara lain:

1. Kompetensi paedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Termasuk ke dalam kemampuan ini antara lain sub-sub kemampuan; (a) menata ruang kelas, (b) menciptakan iklim kelas yang konduktif, (c) memotivasi siswa agar gairah belajar, (d) memberi penguatan verbal maupun non verbal, (e) memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada siswa, (f) tanggap terhadap gangguan kelas, dan (g) menyegarkan kelas jika kelas mulai lelah.
2. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia.
3. Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. dan
4. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan

substansi keilmuan yang menaungi materinya. Kompetensi ini juga disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau sering disebut dengan bidang studi keahlian.

Keempat kompetensi tersebut, dalam pelaksanaannya merupakan satu kesatuan yang utuh, karena seorang yang memiliki kompetensi ini merupakan syarat untuk dikategorikan sebagai guru yang professional. Untuk mencapai guru professional memerlukan proses yang cukup panjang, sesuai dengan pasal 20 UU No 14 tahun 2005 bahwa dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, guru berhak: (a) Merencanakan pembelajaran, yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. (b) Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (c) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. (d) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. (e) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, dan (f) Guru harus memiliki kemampuan dalam menggunakan TIK dalam proses pembelajaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono 2018) Penelitian kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori yang dibaca. Kajian teori dalam penelitian lebih berfungsi untuk

menunjukkan berapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti. Di samping itu, penelitian kualitatif justru dituntut untuk melakukan grounded research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial.

Pengembangan Kompetensi Guru Abad 21

Abad 21 yang ditandai dengan kehadiran era media (digital age) sangat berpengaruh pada pengelolaan pembelajaran dan perubahan karakteristik siswa. Pembelajaran abad 21 menjadi keharusan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pengembangan pembelajaran abad 21, guru dituntut merubah pola pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru (teacher centred) menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centred) karena sumber belajar melimpah bukan hanya nara sumber guru, sehingga peran guru menjadi fasilitator, mediator, motivator sekaligus leader dalam proses pembelajaran. Pola pembelajaran yang konvensional bisa dipahami sebagai pembelajaran di mana guru banyak memberikan ceramah (transfer of knowledge) sedangkan siswa lebih banyak mendengar, mencatat, dan menghafal. Kemampuan pedagogi dengan pola konvensional dipandang sudah kurang tepat dengan era saat ini.

Karakteristik siswa abad 21 sangat berbeda dengan siswa era sebelumnya. Pada abad 21 ini seseorang harus memiliki empat keterampilan (communication, colaboration, critical thinking and problem Sorving dan creativity and innovation). Keterampilan ini sudah semestinya tercermin dalam pembelajaran yang akan

dilaksanakan oleh seorang guru. Keterampilan Abad 21 dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga pilihan metode, media dan pengelolaan kelas benar-benar meningkatkan keterampilan tersebut. Karena itulah menjadi keharusan kemampuan pedagogi guru menyelesaikan dengan karakteristik dan keterampilan yang diperlukan di abad 21.

Karakteristik seperti yang digambarkan di atas, adalah cocok dalam pengembangan profesional guru pada abad 21. Oleh karena itu, guru terus meningkatkan minat baca dengan menambah koleksi buku. Setiap kali terdapat masalah pembelajaran, maka guru perlu menambah pengetahuan melalui bacaan buku, baik cetak, maupun digital yang bias diakses melalui internet. Tanpa minat baca tinggi, maka guru pada era pedagogi siber sekarang ini akan ketinggalan dengan pengetahuan siswanya, sehingga akan menurunkan kredibilitas atau kewibawaan guru. Hilangnya kewibawaan guru akan berdampak serius, bukan saja pada menurunnya kualitas pembelajaran, tetapi juga bagi kemajuan sebuah bangsa.

Salah satu cara untuk mengembangkan kompetensi guru adalah melalui sertifikasi guru, namun hal ini melalui proses yang panjang untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik bagi guru berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat pendidik ditandai dengan satu nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sertifikasi diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi.

Dalam program sertifikasi telah ditentukan kualifikasi pendidikan bagi semua guru di semua tingkatan, yaitu minimal sarjana atau Diploma IV. Dengan memiliki sertifikat pendidik, guru akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum, meliputi: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, hal ini dipertuntukan bagi guru yang telah mengantongi sertifikat pendidik.

Kepentingan sertifikasi dan menjamin mutu pendidikan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Hal ini perlu dipahami karena dengan adanya pasca sertifikasi guru harus tetap meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya agar mutu pendidikan tetap terjamin. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

1. Studi lanjut program Strata 2 atau Magister merupakan cara pertama yang dapat ditempuh oleh para guru dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Dalam program strata 2 guru mengikuti program ilmu pendidikan agar dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

2. Kursus dan Pelatihan, keikutsertaan dalam kursus dan pelatihan tentang kependidikan merupakan cara kedua yang dapat ditempuh oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.
3. Pemanfaatan Jurnal, jurnal yang diterbitkan oleh masyarakat profesi atau perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Artikel-artikel di dalam jurnal biasanya berisi tentang perkembangan terkini suatu disiplin tertentu. Dengan demikian, jurnal dapat dipergunakan untuk memutakhirkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru.
4. Seminar, keikutsertaan dalam seminar merupakan alternatif keempat yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme seorang guru. t. Melalui seminar guru mendapatkan informasi-informasi baru. Namun demikian, di masa-masa yang akan datang akan lebih baik apabila guru tidak hanya menjadi peserta seminar saja, tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyelenggara dan pemakalah dalam acara seminar.

Pengembangan Profesionalisme Guru Abad 21

Abad pengetahuan merupakan suatu era dengan tuntutan yang lebih rumit dan menantang. Suatu era dengan spesifikasi tertentu yang sangat besar pengaruhnya terhadap dunia pendidikan dan lapangan kerja. Perubahan-perubahan yang terjadi selain karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga diakibatkan oleh perkembangan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan, psikologi, dan transformasi nilai-nilai budaya. Perhatian utama

pendidikan di abad 21 adalah untuk mempersiapkan hidup dan kerja bagi masyarakat.

Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru. Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai utamanya dalam hal bidang keilmuannya.

Kadar profesionalisme guru sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mendasari terbentuknya kompetensi profesionalisme. Sebagai contoh, aspek-aspek yang perlu dipahami guru SD adalah:

1. Tahap Perkembangan, perkembangan manusia itu berlangsung secara bertahap. Tiap-tiap tahap perkembangan memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Dilihat dari perkembangannya, peserta didik SD yang berusia 6 – 12 tahun berada pada tahap Kanak-kanak akhir, ciri khas pada tahap ini adalah bermain. Anak gemar bermain sepak bola, bermain kaleng, lompat tali dan segalanya.
2. Perkembangan Kognitif, menurut Piaget dalam (Djumiran_ dkk 2009) perkembangan kognitif peserta didik SD berada pada tahap berpikir konkrit dengan karakteristik:
 - a. Peserta didik SD hanya mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, dan dicium. Peserta didik SD sulit memahami sesuatu yang berada dengan yang ia alami.

- b. Peserta didik SD lebih mudah memahami persoalan-persoalan yang divisualkan dari pada persoalan-persoalan yang disampaikan secara verbal.
 - c. Peserta didik SD, lebih –lebih kelas awal mesih mengalami kesulitan untuk memilah-milah pengalaman belajarnya. Ia menghayati penguasaan belajarnya sebagai suatu totalitas. Pengalaman belajar itu dihayati sebagai suatu kebutuhan atau keseluruhan.
3. Tingkat Kecerdasan, dengan menggunakan intelegensi kecerdasan peserta didik dapat diketahui. Untuk keperluan pendidikan data hasil tes yang berupa induk kecerdasan (IQ) dikelompokkan. (Alice 1963) mengelompokkan kecerdasan manusia menjadi 8 kelompok yaitu:
 - a. Near genius indeks, kecerdasan 140 ke atas.
 - b. Very superior, 130 – 139.
 - c. Superior, 120 – 129.
 - d. Above average, 110 – 119
 - e. Normal or average, 90 – 109.
 - f. Below average, 80 – 89.
 - g. Dull or borderline, 70 – 79.
 - h. Feeble minded, 50 -69.
4. Perkembangan sosial, peserta didik SD yang berusia 6–12 tahun oleh ahli psikologi disebut sebagai usia berkelompok (Gang Age). Anak laki-laki mengelompokkan dengan laki-laki, dan anak perempuan mengelompokkan dengan perempuan. Kelompok-kelompok itu semata-mata untuk bermain dan menyalurkan minat. Mereka memperoleh

kegembiraan, kepuasan dalam bermain dengan teman-teman sebaya. Karakteristik perkembangan sosial peserta didik seperti tersebut di atas berguna bagi guru merancang kegiatan belajar apa yang akan dilakukan siswa.

5. Persepsi yang dimiliki, persepsi yang dimiliki peserta didik, berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat di mana ia tinggal. Kegiatan seperti kerja kelompok, tugas-tugas kelompok, diskusi kelompok merupakan kegiatan-kegiatan dengan karakteristik siswa. Anak yang tinggal di lingkungan masyarakat nelayan, akan memiliki persepsi yang baik tentang jenis-jenis ikan, musim ikan, penangkapan ikan, pengawetan ikan, dan sebagainya. Begitu pula anak yang hidup dalam masyarakat pedagang, akan memiliki persepsi yang baik tentang jual beli, untung rugi dan sebagainya. Guru perlu memiliki persepsi yang dimiliki peserta didik dan memanfaatkannya untuk pemetaan bahan pelajaran yang akan dipelajari siswa. Bahan yang dikemas sesuai persepsi peserta didik akan lebih mudah dipahami dan dikuasai.
6. Kemampuan awal prasyarat. Sebelum membelajarkan peserta didik dengan pokok bahasan tertentu, guru perlu memeriksa apakah siswa sudah memiliki kemampuan yang diperlukan untuk dapat mempelajari pokok bahasan yang akan diajarkan guru. Pemeriksaan kemampuan awal peserta didik bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik sudah memiliki prasyaratnya atau belum. Jika sudah, guru dapat langsung membelajarkan peserta didik dengan pokok bahasan yang telah disiapkan. Tetapi jika peserta didik belum menguasai prasyaratnya, maka prasyarat itu diperkuat terlebih dulu. Sebab jika tidak, maka kegagalan akan terjadi. Hal ini tentu

akan dilaksanakan dengan baik apabila dilaksanakan oleh guru yang profesional (Djumiran_dkk 2009).

Guru harus mengetahui tingkat kecerdasan peserta didiknya, karena kecerdasan mempunyai andil yang besar dalam pengembangan pembelajaran. Guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan mengorganisasikan lingkungan belajar yang produktif.

Karakteristik Guru Abad 21

Perubahan karakter masyarakat secara fundamental sebagaimana terjadi dalam abad 21 tentu berimplikasi terhadap karakter guru. Dalam pandangan progresif, perubahan karakteristik masyarakat perlu diikuti oleh tranformasi kultur guru dalam proses pembelajaran. Jika sekarang masyarakat telah berubah ke masyarakat digital, maka guru juga segera perlu mentranformasikan diri, baik secara teknik maupun sosio-kultur.

Oleh karena itu, perlu mendefenisikan karakter guru seperti apa yang mampu mentranformasikan diri pada era digital abad 21 sekarang ini. Ada ungkapan bahwa, buku itu digantikan dengan teknologi, tetapi peran guru tidak bisa digantikan, bahkan harus diperkuat. Pada eara sekarang, abad 21, guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. Kemampuan para guru untk mendidik pada era pembelajaran digital perlu dipersiapkan dengan memperkuat pedagogi siber pada diri guru. Guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk mendesain pembelajaran kreatif yang memampukan siswa aktif dan berpikir kritis.

Kesimpulan

Guru merupakan suatu pekerjaan professional, yang memerlukan suatu keahlian khusus sehingga kedudukan guru dalam proses pembelajaran masih belum dapat digantikan oleh mesin secanggih apapun. Keahlian khusus inilah yang membedakan profesi guru dengan profesi yang lainnya. Pendidikan guru tidak diperoleh hanya saat pendidikan formal sebelum menjadi guru namun berlangsung seumur hidup (life long teacher education) Artinya meskipun sudah menjangkau jabatannya harus mengembangkan diri secara berkelanjutan atas dasar refleksi (reflective provisional). Guru selama proses melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya perlu melakukan up-grage kompetensinya.

Tantangan kompetensi guru abad 21 adalah beradaptasi memahami disiplin ilmunya dari berbagai konteks, dan peka terhadap perkembangan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Guru harus berpacu mengikuti tuntutan perkembangan, bukan hanya terlibat namun bertindak inovatif. Seorang harus mampu untuk memformulasikan, mengkonstruksi, menyusun, memodifikasi dan peka terhadap informasi sehingga dapat dipahami sebagai suatu pengetahuan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan di semua lini kehidupan. Peserta didik abad 21 hidup dalam lingkungan digital yang penuh dengan arus informasi. Banyak negara melakukan reformasi terhadap tujuan dan praktek pendidikan akibat pengaruh perkembangan TIK dan berbagai bentuk inovasi pendidikan. Harapan terbesar dari inovasi pendidikan adalah adanya dukungan dan pengintegrasian

TIK dalam proses pembelajaran, sehingga mempertinggi mutu pengalaman belajar peserta didik.

Guru harus terlibat aktif di dalam inovasi pedagogis. Guru memiliki peran utama bukan sekedar melaksanakan reformasi pendidikan, namun harus terlibat di dalam merumuskan konsep dan desain reformasi pendidikan yang diperlukan. Disinilah letak pentingnya guru untuk juga bertindak akademis. Pada tataran praktis dalam melaksanakan tugas utama memfasilitasi pembelajaran setiap tindakan guru harus berdasarkan keputusan pedagogis, didasari teori belajar dan pembelajaran mutakhir, teori perkembangan peserta didik dan teori-teori lain yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alice, Crow Lester D. Crow. 1963. *Education Psycology*. New York: American Book Company.
- Djumiran_dkk. 2009. "Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional."
- Smalddino, Dkk. 2012. *Instructional Technology and Media For Learning. 11Th Edition*. United State of America : Pearson.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemeb Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen,." In Bandung: Penerbit Fokus Media.

DIKOTOMI DAN DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA

Poniso Suryo Renggono

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci untuk menapaki masa depan. Pendidikan menjadi penting artinya karena melalui pendidikanlah yang menentukan arah kehidupan melalui proses pembelajaran antar generasi. Melalui proses sosialisasi, enkulturasi di dalam institusi primer yaitu dalam keluarga. Dari situlah proses pewarisan unsur budaya dalam hal ini adalah pembelajaran dilakukan pertamakali. Di dalam literatur ilmu sosial disebutkan bahwa kebudayaan didefinisikan sebagai suatu keseluruhan sistem ide, sistem sosial, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia melalui proses belajar. Ini berarti kunci pokok dari kehidupan manusia itu terletak dari adanya proses belajar.

Sedemikian pentingnya pendidikan ini dalam hidup, maka pendidikan selalu menjadi ranah selalu hangat untuk diperbincangkan. Hal yang menarik lagi dalam diskursus mengenai tema besar ini adalah pijakan akar budaya dan

historisitas dari perkembangan pendidikan di Indonesia. Suatu kondisi yang tidak boleh tidak ada seandainya kita mau meneliti tentang perkembangan pendidikan di negeri kita ini adalah faktor kesejarahan. Bagaimanapun juga sejarah warisan kolonial Belanda turut membentuk wajah pendidikan kita. Kalau kita perhatikan, dari jaman kolonial sampai sekarang ada tendensi yang mengarah pada pola akibat bentukan budaya yang mengakar kuat. Fenomena pembagian menjadi dua bagian antara negeri dan swasta, umum dan agama, sentralistik dan desentralisasi, manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis pusat, kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis pengetahuan, kesemuanya itu lebih kita tempatkan sebagai fakta.

Melalui tulisan ini, penulis berusaha mengungkapkan wajah pendidikan di negeri ini, yang penuh dengan masalah yang sebenarnya merupakan fenomena budaya yang unik. Dari pemaparan di atas maka muncul tema mengenai Problema Dikotomi pendidikan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian Dikotomi dan Dualisme

Istilah dikotomi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dichotomy yang berarti pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang dua bagian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikotomi diartikan pembagian dalam dua kelompok yang saling bertentangan. Sedangkan menurut al-Faruqi, dikotomi merupakan dualisme religius dan kultural. Jadi, arti dasar dari dikotomi adalah memisahkan sesuatu yang padu menjadi dua hal yang berbeda sehingga tampak bertentangan. Menurut KBBI Dualisme

adalah dua prinsip yang saling bertentangan. Secara terminologi dualisme dapat diartikan sebagai dua prinsip atau paham yang berbeda dan saling bertentangan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dikotomi pendidikan adalah memisahkan kelompok mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum untuk disampaikan kepada peserta didik di sekolah/madrasah. Dari simpulan tersebut, bisa dimaknai bahwa pada mulanya ilmu pengetahuan itu disampaikan dalam satu-kesatuan, integral, dan saling berhubungan. Namun setelah keilmuan tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, akhirnya ilmu pengetahuan itu dipisah menjadi dua keilmuan yang tampak saling bertentangan, seperti kelompok ilmu pengetahuan agama dan kelompok ilmu pengetahuan umum.

Berdasarkan uraian di atas, jika dikotomi dan dualisme tersebut dihubungkan dalam konteks pendidikan di Indonesia, maka bisa dipahami bahwa dikotomi dan dualisme merupakan pemisahan keilmuan menjadi dua kelompok, yaitu ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu pengetahuan umum. Namun, dari kedua istilah itu, terdapat dua perbedaan yang cukup signifikan, yaitu dikotomi lebih terfokus pada aspek isi atau konten materi, sedangkan dualisme itu lebih mengarah pada sistem pengelolaan pendidikan, seperti madrasah di bawah naungan Kementerian Agama dan sekolah di bawah payung Kementerian Pendidikan Nasional.

Tinjauan Historis Dualisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia

Persoalan dikotomi dan dualisme terasa sudah mendarah-daging dalam pendidikan di Indonesia. Hal ini lantaran dikotomi

dan dualisme itu sudah ada sejak lama, tepatnya ketika Belanda menjajah negeri ini. Latar belakang munculnya dikotomi dan dualisme dalam pendidikan itu didasarkan pada beberapa kepentingan Belanda sebagai bangsa penjajah, seperti: untuk meningkatkan pengetahuan mereka berkaitan dengan ilmu-ilmu umum dan pengetahuan tentang masyarakat Indonesia, keperluan tenaga pembantu rumah tangga dari penduduk pribumi sehingga mereka diberikan pendidikan secukupnya, ingin mendapatkan simpati dari warga penduduk pribumi karena jasa pendidikan yang diberikan, kepentingan misionaris, dan lain sebagainya.

Pendidikan yang diterima rakyat pribumi tentu tidak sama dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang Belanda. Perlakuan diskriminasi dalam soal pendidikan sangat kentara, seperti diberlakukannya sistem dualisme pendidikan, yaitu: ada sekolah khusus untuk orang Belanda dan ada juga sekolah khusus untuk pribumi (pesantren, madrasah), ada sekolah khusus orang-orang kaya dan ada pula sekolah khusus untuk rakyat-rakyat miskin, bahkan ada lagi sekolah yang diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran, tapi ada juga sekolah yang tidak diberikan izin untuk melanjutkan pelajaran. Berdasarkan dualisme yang diciptakan seperti itu, terlihat jelas bahwa pendidikan yang diberikan bukan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan taraf kehidupan masyarakat, namun lebih ditujukan untuk mempertahankan perbedaan sosial agar masyarakat pribumi tetap terpecah belah. Hal ini sejalan dengan sistem politik *divide et impera* Belanda, yaitu politik adu domba, dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar tidak ada kekuatan besar yang mengancam dan mampu untuk mengalahkan

Belanda. Tidak heran, selama Belanda menjajah Indonesia, rakyat sangat miskin, terbelakang dari pendidikan, bahkan pribumi yang tergolong kaya dan punya kekuasaan seringkali menindas saudaranya sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa politik *Devide et Impera* Belanda itu benar-benar sukses diterapkan di Indonesia selama 350 tahun, dan salah satu jalurnya yang digunakan adalah pendidikan dengan sistem dualisme.

Melalui sistem dualisme tersebut, ternyata pemerintah Belanda dengan mudah mengawasi dan mengontrol secara ketat pendidikan yang dilaksanakan oleh rakyat pribumi. Salah satu kebijakan Belanda untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan Islam di pesantren atau madrasah, adalah dengan penerbitan *Ordonansi Guru*, yaitu setiap guru agama wajib memiliki surat izin dari pemerintah Belanda. Selain kebijakan itu, ada juga kebijakan Belanda yang dikenal dengan nama *Ordonansi Sekolah Liar* (*Wilde School Ordonantie*), yaitu penutupan sekolah atau madrasah yang tidak memiliki izin atau mengajarkan mata pelajaran yang tidak disenangi oleh pemerintah. Kebijakan lainnya adalah peraturan mengenai netral agama di sekolah umum, seperti yang tertera di dalam *Indische Staatsregeling* bahwa pendidikan umum itu netral, artinya pengajaran yang diberikan harus menghormati keyakinan masing-masing.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan dan membatasi karena kekhawatiran akan munculnya militansi kaum muslimin terpelajar. Wujud kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menekan itu misalnya, tercermin dalam *ordonansi guru* pada 1905 kemudian diperbarui pada 1926 yang mewajibkan guru-guru agama memiliki surat izin mengajar. Pengalaman penjajahan

yang direpotkan perlawanan rakyat di Cilegon pada 1888 yang dikenal sebagai pemberontakan petani Banten, misalnya, dipengaruhi oleh kyai-kyai pesantren dan pemimpin tarekat menjadi pelajaran serius untuk menerbitkan peraturan tersebut. Selain itu juga ordonansi sekolah liar sejak 1932 yang dimaksudkan untuk mengawasi sekolah swasta yang diselenggarakan orang Indonesia dan Timur asing lainnya. Kebijakan itulah yang memicu madrasah dan pesantren mengisolir diri dari dunia luar dengan tetap mengajarkan pelajaran agama. Masing-masing institusi pendidikan tersebut mempunyai sistem pendidikan yang secara diametral berbeda dan dikotomik.

Pada masa selanjutnya, ketika masa penjajahan Hindia Belanda (dan Jepang), institusi-institusi pendidikan Islam tradisional di atas menambah fungsi dan perannya, yakni sebagai pusat perlawanan dan resistensi terhadap kolonialisme dan imperialisme (Barat-Kristen). Di sisi lain, institusi pendidikan tradisional ini juga merupakan “lawan” dari institusi pendidikan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda dan lainnya. Dalam kiprahnya semua institusi pendidikan yang ada saat itu secara diametral sangat berbedadan menghasilkan sistem pendidikan yang berbeda pula.

Dualisme Sistem Pendidikan Yang Ada di Indonesia

Penilaian kemajuan suatu bangsa atau negara terletak pada bagaimana pendidikan berkembang di negara tersebut, apakah sudah sangat maju dan berkembang serta merata apakah masih tercecce pemerataannya serta sistemnya. dualisme sistem pendidikan di Indonesia baik itu antara lembaga pendidikan negeri maupun swasta, serta lembaga pendidikan umum maupun agama selalu terjadi hal yang kontroversial terkait kebijakan-

kebijakan pemerintah yang sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan. Terkait dianak tirikannya lembaga pendidikan swasta maupun lembaga pendidikan agama yang secara langsung dinaungi oleh kementrian agama. Hal yang sering terjadi dalam pembagian kedua lembaga pendidikan ini terkait penyamarataan fasilitas dan alat penunjang dalam proses pembelajaran serta melanjutkannya anak didik dalam proses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Lembaga pendidikan agama sangat dianak tirikan terkait jenjang pendidikan lanjutan yang akan ditempuh oleh anak didiknya apabila ingin melanjutkan ke lembaga pendidikan umum. Hal ini bisa kita lihat di lembaga pendidikan umum yang jumlah lulusan dari lembaga pendidikan agama yang melanjutkan di lembaga pendidikan umum bisa dihitung dengan jari, baik itu negeri maupun swasta. Tetapi hal yang paling terlihat jelas dan nyentrik terlihat dalam lembaga pendidikan umum negeri. Namun hal ini sudah diatur dan diantisipasi dengan dikeluarkannya SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri P&K no.299/u/1984 dengan menteri agama no 45 tahun 1984 yang dijiwai oleh TAP MPR No. II/TAP/MPR/1983, tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah yang isinya antara lain adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi dan begitu pula sebaliknya serta berhak mendapat bantuan sarana prasarana, biaya dan diakui ijazahnya.

Sudah sangat umum ditelinga bahwa lembaga pendidikan negeri adalah lembaga milik pemerintah yang difasilitasi dan dibiayai oleh negara. Maka tak heran pendidikan di lembaga pendidikan negeri tanpa ditarik biaya sepeser pun serta fasilitas atau alat penunjang

pembelajaran sangat cukup dan terlengkapiHal ini sangat terbalik 90 derajat dengan keadaan lembaga pendidikan swasta, walaupun adanya bantuan dari pemerintah terhadap sekolah swasta melalui dana BOS (bantuan operasional sekolah) tetapi dirasa tidak memenuhi kebutuhan dalam proses belajar mengajar terkait fasilitas dan honor pendidik. Sehingga mengakibatkan terdakang lembaga pendidikan swasta menarik tarif yang begitu tinggi untuk meningkatkan mutu lembaga tersebut. Dari masalah ini membuat Masyarakat lebih tertarik menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri yang kapasitasnya sangat terbatas. Adanya sistem pemilihan nilai maupun tes semakin mempersulit peserta didik untuk dapat bersekolah di lembaga pendidikan negeri. Dan inilah yang mengakibatkan banyaknya pengangguran serta anak-anak yang tidak mau sekolah terkait dengan biaya yang sangat tinggi yang tidak mampu dibayar oleh orang tua mereka bila bersekolah di sekolah swasta terutama dari kalangan masyarakat menengah kebawah. Walaupun banyak beasiswa dari beberapa pihak yang menyediakan untuk keluarga yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya tetapi beasiswa ini kadang tergolong rumit dan jarang diketahui oleh masyarakat sekitar.

Upaya Penyelesaian Masalah Dikotomi dan Dualisme di Indonesia

Dalam hal ini ada dua pokok yang harus dibenahi pemerintah untuk meningkatkan integritas pendidikan di Indonesia yaitu pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah Indonesia terutama di daerah terpencil serta penyejahteraan tenaga pendidik. Yang pertama terkait pemerataan ini, harus adanya sinkronisasi antara pembagunan baik itu infrastuktur maupun ekonomi serta

pendidikan di suatu daerah tersebut terkait kebijakan otonomi daerah. Majunya dan sejahteraan disuatu daerah diukur tingkat kecerdasan masyarakat tersebut sehingga mampu menopang dan meningkatkan ekonomi dan pembangunan daerah. Maka pendidikan ialah komponen terpenting jika ingin memajukan atau mensejahterakan suatu daerah. Dan hal ini dilakukan dengan pemerataan pendidikan yang tidak hanya tersentral di daerah Ibu kota dan sekitarnya saja terutama pulau Jawa. Pendidikan di Indonesia saat ini terpusat dan tersentral hanya dipulau Jawa, hal inilah yang menyebabkan banyaknya anak didik yang melancong ke Jawa untuk mencari Ilmu.

Yang kedua adalah penyejahteraan tenaga pendidik baik itu guru maupun dosen yang harus adanya dukungan dari Pemerintah untuk memajukan pendidikan melalui tenaga pendidik tersebut baik itu berupa materil maupuun immateril. Salah satu contoh yang terjadi adalah perbedaan tunjangan fungsional yang diana para guru swasta pendapatannya jauh di bawah guru negeri padahal Peran guru swasta sendiri tak berbeda jauh dengan guru negeri. Perannya pun sama untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Bahkan, ketika di suatu sekolah negeri mengalami kekurangan guru di suatu mata pelajaran, maka guru swasta lah yang diberdayakan. Sebelum ini berpengaruh terhadap mutu pendikan, pemerintah daerah harus segera melakukan terobosan. Salah satunya dengan memberikan tunjangan daerah kepada para guru swasta. Tak hanya itu, yayasan sebagai pembina di sekolah swasta pun sebutnya harus juga meningkatkan penghasilan guru mereka. Ketika pemerintah mendukung dan bekerja sama dengan

tenaga pendidik maka akan tercipta sebuah hubungan yang baik untuk semakin memajukan Pendidikan di Indonesia ini.

Namun di satu sisi dualisme pengelolaan lembaga pendidikan itu, sekalipun beresiko, juga membuahkan keuntungan yang tidak sederhana. Di antaranya misalnya, terjadi kompetisi yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendinamisasi kedua jenis lembaga pendidikan yang berada di bawah kementerian yang berbeda itu. Contohnya Madrasah Swasta ingin meraih prestasi lebih unggul dibanding sekolah umum negeri. Demikian pula, sekolah umum negeri juga tidak mau kalah dibanding Madrasah swasta. Hasil ujian nasional tidak saja dibandingkan antar propinsi, atau kabupaten kota, tetapi juga antara sekolah Negeri dan swasta. Kesemua itu memacu semangat untuk sama-sama maju. Demikian pula, tatkala mendengar akreditasi institusi perguruan tinggi negeri lebih tinggi dibanding perguruan tinggi swasta begitupun sebaliknya, maka juga menumbuhkan semangat perguruan tinggi swasta untuk mengejar ketertinggalan itu. Fenomena ini bisa dikatakan bahwa dualisme pengelolaan pendidikan ternyata menyimpan kelebihan yang sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan.

Oleh sebab itu, agar pendidikan kita bisa lebih baik, sebaiknya dikotomi sekolah swasta dan negeri harus dihentikan. Sekolah-sekolah swasta yang sudah unggul diupayakan agar tetap mempertahankan keunggulannya sambil pemerintah terus mengupayakan sekolah-sekolah swasta lainnya dan juga sekolah-sekolah negeri untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka dan menjadi unggul juga. Bila itu bisa terwujud, niscaya pendidikan berkeadilan bisa terwujud.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari tulisan ini adalah:

1. dikotomi adalah memisahkan sesuatu yang padu menjadi dua hal yang berbeda sehingga tampak bertentangan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dikotomi pendidikan adalah memisahkan kelompok mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum untuk disampaikan kepada peserta didik di sekolah/madrasah. Dan dualisme itu lebih mengarah pada sistem pengelolaan pendidikan, seperti madrasah di bawah naungan Kementerian Agama dan sekolah di bawah payung Kementerian Pendidikan Nasional.
2. dikotomi dan dualisme itu sudah ada sejak lama, tepatnya ketika Belanda menjajah negeri ini. Latar belakang munculnya dikotomi dan dualisme dalam pendidikan itu didasarkan pada beberapa kepentingan Belanda sebagai bangsa penjajah dengan menggunakan sistem politik *divide et impera* Belanda, yaitu politik adu domba, dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar tidak ada kekuatan besar yang mengancam dan mampu untuk mengalahkan Belanda. Pendidikan yang diterima rakyat pribumi tidak sama dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang Belanda. Perlakuan diskriminasi dalam soal pendidikan contohnya seperti diberlakukannya sistem dualisme pendidikan, yaitu: ada sekolah khusus untuk orang Belanda dan ada juga sekolah khusus untuk pribumi.
3. Dalam hal ini ada dua pokok yang harus dibenahi pemerintah untuk meningkatkan integritas pendidikan di Indonesia. Yang pertama terkait pemerataan ini, harus adanya sinkronisasi

antara pembangunan baik itu infrastuktur maupun ekonomi serta pendidikan di suatu daerah tersebut terkait kebijakan otonomi daerah. Yang kedua adalah penyejahteraan tenaga pendidik baik itu guru maupun dosen yang harus adanya dukungan dari Pemerintah untuk memajukan pendidikan melalui tenaga pendidik tersebut baik itu berupa materil maupuun immateril.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Dualisme” Kamus Besar Bahasa Indonesia (jakarta : Balai Pustaka, 1989).
- Fauzan Suwito, *Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara, Studi Perkembangan Sejarah dari Abad 13 hingga Abad 20 M*, (Bandung: Angkasa, 2004)
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1992).
- Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta: PTRajaGradindo Persada, 2009)

PENGELOLAAN ADMINISTRASI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Fatma Dewi

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU Nomor 20 Tahun 2003). Selain itu, pendidikan Nasional juga harus mampu menumbuhkan jiwa patriotik dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu, perlu dikembangkan juga iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian itu, pendidikan Nasional diharapkan akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Tujuan nasional dapat diwujudkan melalui kegiatan yang ditunjang oleh pelayanan administrasi pendidikan yang teratur, terarah, terencana, dan berkesinambungan. Pelayanan administrasi pendidikan yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar karena administrasi merupakan upaya menjadikan kegiatan dan kerja sama anggota organisasi serta unsur-unsur sekolah menjadi efektif dan efisien (Gunawan, 1996).

Peningkatan mutu pendidikan suatu sekolah merupakan tugas kepala sekolah. Untuk itu kepala sekolah harus mampu melakukan upaya pengembangan pengelolaan sekolah seperti dengan melakukan manajemen administrasi pendidikan yang salah satunya adalah manajemen administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah selaku manajer di sekolah dituntut untuk mampu mengelola manajemen administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Keberadaan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam dunia pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen yang bertujuan mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Administrasi tenaga pendidik dan kependidikan yang tertib dan teratur, sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dengan demikian, diharapkan program peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar

Administrasi juga dapat diartikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha

kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Dalam batasan tersebut di atas, makna administrasi dapat diurai paling tidak menjadi lima pengertian pokok, yaitu: administrasi merupakan kegiatan atau kegiatan manusia, rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses/pengelolaan dari suatu kegiatan yang kompleks. Oleh sebab itu, administrasi bersifat dinamis, proses itu dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi, proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien (Tsauri: 2007: 2).

Hick dan Gullet (dalam Gunawan,1996) mengatakan bahwa teori administrasi adalah bagian kedua dari tiga dasar teori klasik organisasi. Di sini terdapat perbedaan yang dibiaskan pada praktek manajerial dalam teori administrasi. Mengingat teori birokrasi memberikan penjelasan organisasi yang dibangun secara “ideal”, teori administrasi merumuskan strategi spesifik untuk menerapkan struktur birokrasi. Teori administrasi menterjemahkan banyak prinsip dasar model birokrasi secara deskriptif ke dalam prinsip praktek manajerial preskriptif. Buktinya, teori administrasi memiliki gelar populer sebagai “prinsip manajemen”.

Menurut pendapat George R Terry (1958) bahwa administrasi adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Fungsi administrasi Pendidikan

Soetjipto (2004) mengatakan agar kegiatan dalam komponen administrasi pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, kegiatan tersebut harus dikelola melalui suatu tahapan proses yang merupakan daur (siklus). Adapun proses administrasi pendidikan itu meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervisi kepegawaian dan pembiayaan dan evaluasi. Semua fungsi tersebut satu sama lain bertalian sangat erat. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang fungsi-fungsi tersebut di bawah ini akan diuraikan secara lebih rinci

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pengkoordinasian (Coordinating)

Adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, memerlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat

menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpangsiuran dalam tindakan.

Menurut pendapat George R Terry (1958) fungsi manajemen adalah suatu proses dalam beberapa langkah :

1. Perencanaan (*planning*) sebagai dasar yang akan di laksanakan dalam pengelolaan administrasi .Mempersiapkan segala kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan memperhitungkan segala sesuatu pelaksanaan pekerjaan
2. Pengorganisasian (*organization*) adalah cara mengumpulkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat bekerja menurut keahlian masing masing
3. Penggerakan (*Actuating*) untuk dapat menggerakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan demi masa depan tujuan dari pendidikan .
4. Pengawasan (*Controlling*) untuk dapat mengevaluasi pergerakan dari sebuah administrasi pendidikan

2. Prinsip-prinsip Administrasi Pendidikan

Menurut Purwanto (2007) prinsip merupakan sesuatu yang dibuat sebagai pegangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di antara prinsip-prinsip administrasi pendidikan antara lain: adanya sumber daya manusia (SDM) atau sekelompok manusia (sedikitnya dua orang) untuk ditata, adanya tugas/fungsi yang harus dilaksanakan maksudnya ada sebuah kerjasama dari sekelompok orang, adanya penataan/pengaturan dari kerjasama tersebut, adanya non manusia seperti peralatan dan perlengkapan

yang diperlukan dan yang harus ditata, dan adanya tujuan yang hendak dicapai bersama dari kerjasama tersebut.

Selanjutnya menurut Tsauri (2007) ada sebuah prinsip-prinsip administrasi yang menyinggung organisasi, di antara prinsip-prinsip tersebut adalah: memiliki tujuan yang jelas, tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan pikiran, adanya kesatuan perintah (*Unity of command*); para bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung dari padanya menerima perintah atau bimbingan dan kepada siapa ia harus bertanggung jawabkan hasil pekerjaannya, koordinasi tentang wewenang dan tanggung jawab, maksudnya ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota, dan adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harmonis dan kooperatif.

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Pengertian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI pasal 39 ayat (1) dan (2) pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/ madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, dan tenaga kebersihan.

b. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kepribadian, pedagogic, profesional, dan socia. Menurut Sarimaya (dalam Yamin, 2010) dijelaskan keempat jenis kompetensi guru tersebut, sebagai berikut.

- 1) Kompetensi Kepribadian
- 2) Kompetensi Pedagogik
- 3) Kompetensi Profesional
- 4) Kompetensi Sosial

Kompetensi ini merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat sekitar. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 tahun 2008 standar administrasi sekolah atau madrasah wajib dipenuhi. Agar dapat mengimbangi pelayanan yang dilakukan maka tenaga administrasi perlu memiliki dimensi kompetensi, yaitu sebagai berikut.

- a) Dimensi kompetensi kepribadian

Memiliki integritas dan akhlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, fleksibel, ketelitian, kedisiplinan, kreatif, inovasi, dan tanggung jawab.

b) Dimensi Kompetensi Sosial

Memiliki kompetensi untuk bekerja dalam tim, pelayanan prima, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, dan membangun hubungan kerja.

c) Dimensi Kompetensi Teknis

Kompetensi untuk melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, dan penerapan teknologi informasi komunikasi.

d) Dimensi Kompetensi Manajerial

Kompetensi ini untuk pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun laporan, dan program kerja, mengorganisasi staf, mengembangkan staf, menciptakan iklim kerja yang kondusif, dan menyusun laporan.

4. Indikator tenaga pendidik dan Kependidikan

Pemenuhan jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan sudah memadai

- a. Jumlah Pendidik memenuhi standar
- b. Jumlah tenaga Kependidikan Memenuhi Standart
- c. Kualifikasi Pendidik Memenuhi Standar

- d. Kualifikasi tenaga Kependidikan memenuhi Standar
- e. Kompetensi pendidik memenuhi standar
- f. Koptensi tenaga pendidik memenuhi standar

Indikator Pengelolaan Administrasi

Menurut Siagian (1994 : 24) pembinaan sumber daya manusia dapat juga diartikan, Pembinaan Mutu kehidupan berkarya demi tercapainya tujuan organisasi publik ada indikator indikator patologi bagi pembinaan sumber daya manusia yang meliputi bina keperilakuan, persepsi, profesional, skill, espektasi, dan etos atau sistim kerja .

Kerangka Berpikir

Pengelolaan administrasi akan lebih maksimal apabila ada seorang Tenaga pelaksana yang bijak dalam menjalankan manajemen. Administrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkopetensi dan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menjalankan administrasi dengan baik.

Menurut Lonfland (dalam Moleong, 2010 : 157), bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Untuk itu, dalam hal ini, sumber data dalam hal ini adalah (1) kata-kata dan tindakan sebagai sumber data yang utama, (2) sumber data yang tertulis, foto dan statistik, sebagai sumber tambahan. Berdasarkan pendapat tersebut dijelaskan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Data primer berupa pendapat atau info dari kepala sekolah, guru, dan kepala UPT Disdikbud Muara Komam berkaitan dengan pelaksanaan administrasi tenaga pendidik dan kependidikan.
- b. Data sekunder berupa dokumen administrasi tenaga pendidik dan kependidikan.

Saya adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan terlibat langsung dengan masalah administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Dan Saya mohon informasi tersebut berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat.

Adapun penentuan nara sumber yang tepat, dalam pemberian informasi dan data berkaitan dengan administrasi tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Sekolah
- b. Staf Administrasi Sekolah
- c. Pengawas Pendidikan
- d. Guru

Temuan dari informasi nara sumber adalah

A. Aspek Perencanaan

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah bahwa Tenaga untuk Pengelola administrasi sangat kurang atau kekurangan pegawai. Tidak akan mungkin administrasi berjalan dengan baik apabila kekurangan tenaga untuk mengelolanya. Menurut

observasi peneliti di Sekolah hanya ada satu karyawan yang Bukan PNS .

Sumber daya manusia dalam administrasi dapat meningkatkan produktifitas berdasarkan pembagian tugas kerja yang di bebaskan oleh pimpinan, dengan adanya pendelegasian wewenang sesuai rincian tugas. Dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari semua pegawai tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi baik sesama karyawan maupun dengan pihak luar. Dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi diperlukan cara bagaimana individu individu melakukan komunikasi dengan baik. Di samping komunikasi yang baik dan efektif di perlukan Tenaga Administrasi yang mempunyai kopetensi. Sesuai dengan harapan untuk dapat mengemban tugas yang dibebankan pimpinan kepada masing – masing individu.

Berdasarkan observasi, melihat ada daftar pada Sekolah yang memuat berikut ini.

Daftar perencanaan naik pangkat dan daftar kenaikan berkala diperbaharui setiap sebulan sekali. Daftar waktu cuti dan daftar pensiun diperbaharui sekali enam bulan.

Menurut peneliti semakin tinggi pendidikan seseorang akan berpengaruh kepada kinerja yang dilakukan. Standar Tenaga administrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008. Tenaga administrasi adalah Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan pendidikan walaupun tidak terlibat langsung tapi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidikan juga mempunyai kompetensi yang dapat diharapkan untuk mampu melakukan kinerja yang optimal.

Maksud dengan kompetensi adalah kecakapan individu untuk mampu bekerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini seandainya dikelola dengan teratur dan disiplin maka akan terjadi Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien. Sumber Daya Manusia yang begini akan menjadi Manusia yang potensial serta dapat berusaha mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia. Tenaga pendidik dan kependidikan ini adalah para guru, dosen, rektor, kepala sekolah, para anggota tata usaha, tenaga semua yang ada di sekolah dan semua yang berpartisipasi untuk sekolah tersebut. Para Tenaga pendidik dan kependidikan ini akan lebih baik apabila kita lihat dari perekrutan, seleksi, pemberian tugas, penempatan tugas, penghargaan, pembinaan atau pelaksanaan latihan, dan kemudian sampai pada pemberhentian yang baik. Cara pengelolaan dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan ini sangat berbeda dengan para profesi bisnis misalnya. Dalam zona pendidikan tujuan pengelolaan Sumber Daya Manusia adalah pembangunan pendidikan akan lebih bermutu. Aktif, kreatif, berkreasi, berprestasi, diharapkan supaya sumber daya manusia itu lebih termotivasi dan kreatif dengan harapan sebagai berikut.

B. Aspek Pengawasan

Administrasi pendidikan sangat penting dalam system upaya pelaksanaan pendidikan. Untuk mengimplementasikan fungsi fungsi manajemen pendidikan serta mengerakan jalannya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang maksimal. Dalam fungsi-fungsi kepemimpinan, tugas pokok pemimpin adalah mengantarkan, mengelompokan, memberi arahan, mendidik,

membimbing, agar bawahan termotivasi untuk mengikuti pemimpin supaya tercapai tujuan yang diharapkan. Seorang pemimpin harus mampu memberi semangat kepada anak buahnya, perhatian, membesarkan hati dan mampu memberi pengaruh positif kepada anak buahnya. Dalam hal pengawasan pelaksanaan administrasi pendidikan, Kepala Sekolah bersama dengan Pengawas Pendidikan sudah baik melaksanakan tugasnya. Sudah mengacu kepada peraturan yang ada dan sesuai dengan TUPOKSI yang diamanahkan Dinas Pendidikan Kabupaten. Di mana setiap ada kesempatan dan informasi yang harus disampaikan Kepala Sekolah selalu mengunjungi sekolah. Untuk Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, supervisi. Pada acara K3S atau KKG Kepala Sekolah dan pengawas juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Hasil dari observasi lakukan di Sekolah sangat sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala Sekolah. Dengan komunikasi dan silaturahmi yang baik kepala Sekolah membangun jembatan hati untuk mencapai tujuan pendidikan yang seoptimal mungkin. wawancara dilanjutkan lagi dengan menanyakan bagaimana cara pengawas pendidikan pada Sekolah melakukan pembinaan ke sekolah. Team dari Dinas Pendidikan Kabupaten sering datang mengadakan pembinaan ke Sekolah. Sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan Dinas Pendidikan untuk mencapai hasil pendidikan semaksimal mungkin. Pembinaan yang berjenjang sangat diharapkan tenaga pendidikan dan kependidikan untuk meningkatkan kemampuan setiap individu dalam memberikan pelayanan baik kepada Siswa, Orang Tua, sesama karyawan atau dengan masyarakat. lintas

sektoral seperti Dinas pertanian, Puskesmas juga mengadakan pembinaan kesekolah dengan program yang sangat di perlukan oleh siswa seperti Imunisasi dan Pemeriksaan gigi, deteksi dini dan lain lain. Melalui Sekolah perusahaan yang ada di daerah Muara Komam juga berpartisipasi memajukan pendidikan dengan mengadakan pelatihan pelatihan untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Tenaga Pendidik dan Kependidikan sangat diharapkan mempunyai keterampilan, kecakapan, pengetahuan yang bisa diandalkan. Pengawas pendidikan setiap seminggu sekali berkunjung ke sekolah untuk mengobservasi jalannya kegiatan belajar dan mengajar, penerapan kurikulum, Pengelolaan administrasi pendidikan, kebersihan ketertiban dan lain-lain.

C. Kendala dalam pelaksanaan administrasi

Kendala yang sangat berarti adalah kekurangan sumber daya manusia pada Sekolah tidak adanya Kepala Tata usaha yang dapat membantu Kepala Sekolah untuk melaksanakan administrasi. Dengan tidak adanya Kepala Tata Usaha di Sekolah maka Kepala Sekolah sebagai pemimpin bertugas rangkap. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada atau tidak memadai ini juga menjadi kendala yang sangat berarti bagi pelaksanaan administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Kemauan untuk berinovasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan administrasi tenaga pendidik dan kependidikan.

Menurut observasi strata pendidikan sangat penting karena tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai kompetensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Pasal 28 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa

Pendidik merupakan agen Pembelajaran yang harus memiliki empat kompetensi berikut.

1. Kopetensi *pedagogic*
2. Kopetensi kepribadian
3. Kopetensi professional
4. Kompetensi Sosial

Sumber daya manusia yang kurang memiliki kopetensi merupakan suatu hambatan yang paling besar bagi sebuah organisasi. Maka diperlukan pembinaan dari segala lini. Untuk Pendidikan Dasar strata pendidikan pelaksana administrasi minimal SLTA menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2008. Karena pelaksana administrasi dituntut kopetensi tertentu untuk bisa menjadi pengelola administrasi.

Sarana dan prasarana bertahap dicukupkan supaya administrasi dapat berjalan sebagai mana mestinya. Tanpa adanya sarana dan prasarana tidak akan mungkin administrasi akan bisa terselenggara. Kalau jaringan internet sudah di pasang jaringan wifi, jadi tenaga pendidik dan kependidikan yang ingin bekerja atau butuh informasi dapat mengakses internet dengan gratis. wifi ini memang diperuntukkan untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan ,dan semua pihak yang memerlukan.

KOMPONEN PENDIDIKAN NASIONAL (PENDIDIK/GURU)

Wulan Dwi Miharni

A. Komponen Pendidikan Nasional

Dalam aktifitas pendidikan terdapat enam komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi namun komponen integrasinya terutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Komponen-komponen pendidikan tersebut meliputi: tujuan, pendidik, siswa, isi/materi, metode, dan situasi lingkungan.

Selanjutnya Noeng Muhadjir mengungkapkan bahwa komponen-komponen pendidikan meliputi: tujuan, subyek didik, pendidik, lingkungan. Sejalan dengan penelitian di atas, Aminuddin Rasyad berpendapat bahwa “unsur-unsur esensial pendidikan adalah: materi pendidikan, siswa dan pendidik, tujuan pendidikan, cara-cara mendidik, alat pendidikan, lingkungan pendidikan, evaluasi pendidikan.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang komponen-komponen pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 komponen pendidikan yang digunakan dalam acuan pendidikan

yaitu: 1) tujuan, 2) siswa, 3) pendidik, 4) isi/materi, 5) situasi lingkungan dan 6) alat pendidikan.

1. Komponen Tujuan

Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktifitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan, sehingga efektifitas proses pendidikannya selalu diukur apakah dapat mencapai tujuan atau tidak.

Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan. Sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Oleh karena itu perumusan tujuan dengan jelas dan tegas, menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofis.

Dalam perspektif Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Amir Faisal, tujuan pendidikan Islam pada hakekatnya sama dengan tujuan diturunkannya agama Islam yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa (muttaqin). Adapun manusia yang bertakwa itu adalah yang: 1) Dapat melaksanakan ibadah mahdah dan ghairu mahdah. 2) Membentuk warga negara yang bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsanya, dalam rangka bertanggung jawab kepada Allah. 3) Membentuk dan mengembangkan tenaga profesional yang siap dan terampil untuk memasuki teknostruktur masyarakatnya. 4) Mengembangkan tenaga ahli dibidang ilmu agama Islam. Urain tentang tujuan di atas

menunjukkan bahwa tanpa adanya tujuan yang jelas maka hasil yang didapat tentu tidak akan baik.

2. **Komponen Peserta Didik**

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang ada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik.

Syamsul Nizar mendeskripsikan enam kriteria peserta didik: 1) Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri. 2) Peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. 3) Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan dimana ia berada. 4) Peserta didik merupakan unsur utama jasmani dan rohani. 5) Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis.

Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka proses pengembangan perencanaan dan desain pembelajaran, siswa harus dijadikan pusat dari segala kegiatan. Dalam proses pendidikan peserta didik di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Oleh

karena itu agar seorang pendidik berhasil dalam proses pendidikan, maka ia harus memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya.

3. Komponen Pendidik

Pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkahlaku peserta didik.²² Terdapat dua kategori pendidik yaitu pendidik menurut kodrat (orang tua) dan pendidik menurut jabatan (pendidik). Abudin Nata menjelaskan bahwa “dari komponen-komponen pendidikan, pendidik merupakan komponen pendidikan terpenting, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.”

Sedangkan tugas pendidik (pendidik) yang utama, menurut Imam al-Ghazali adalah “menyempurnakan, membersihkan dan menyucikan serta membawa hati manusia untuk mendekati diri pada Allah Swt.” Pendidik sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab dari tiga pihak yaitu orang tua, masyarakat dan negara.

Tanggung jawab dari orang tua diterima pendidik atas dasar kepercayaan, bahwa pendidik mampu memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan siswa. Dalam lembaga pendidikan formal seorang pendidik dikatakan baik jika memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Mustaqim dalam Psikologi pendidikan, ada tiga bagian utama kompetensi yang harus dikuasai seorang pendidik untuk dapat mengajar dengan baik, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan materi ajar, dan kompetensi cara mengajar.

Penguasaan materi pelajaran diperlukan agar peserta didik dibimbing untuk mampu menguasai penyampaian informasi dalam bentuk ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan baik. Kompetensi cara mengajar sangat dibutuhkan agar pendidik terampil dalam perencanaan pembelajaran, merancang strategi pembelajaran yang tepat, mampu melaksanakan dengan baik, dan mengevaluasinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut peraturan Pemerintah No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa pendidik wajib memiliki empat kompetensi, yaitu 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi profesional, 3) kompetensi kepribadian, 4) kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian penting dikuasai seorang pendidik karena dengan kompetensi kepribadian inilah memungkinkan pendidik meramu berbagai potensi yang dimilikinya sehingga pembelajaran menjadi efektif.

4. Komponen Materi/Isi Pendidikan (Kurikulum)

Salah satu konsep yang harus dikuasai oleh pendidik untuk menunjang kompetensi adalah kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curare* yang berarti tempat

berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish.

Membicarakan masalah kurikulum pendidikan yang dikaitkan dengan madrasah diniyah sebenarnya merupakan sesuatu hal yang tabu dikalangan ini terutama madrasah diniyah yang berada dikawasan pondok pesantren salaf/tradisional. Kata kurikulum tidak begitu populer, walaupun yang dimaksud dengan kurikulum adalah kegiatan baik yang berorientasi pada pengembangan intelektual, keterampilan, maupun kegiatan-kegiatan lain.

Terlepas dari hal tersebut madrasah diniyah yang berada di pesantren salaf menyebutnya dengan materi pelajaran. Dalam dunia pendidikan kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di madrasah atau perpustakaan tinggi.

Dari pengertian kurikulum secara sempit menurut Supiana adalah sejumlah materi/isi pelajaran. Materi/isi pendidikan adalah segala sesuatu pesan yang disampaikan oleh pendidik kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Secara lebih luas Nurdin dan Basyirudin mengartikan kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu: kurikulum diartikan merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan madrasah dalam rangka memengaruhi peserta didik dalam belajar untuk mencapai

suatu tujuan, termasuk di dalamnya kegiatan pembelajaran, mengatur strategi dalam pembelajaran, cara mengevaluasi program pengembangan pembelajaran dan sebagainya.

Crow and Crow mendefinisikan bahwa “kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah.” Sedangkan M. Arifin memandang “kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan.”

Konsep kurikulum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 1 ayat 11: menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Definisi di atas menjadi pedoman bagi konsep kurikulum setiap jenis dan jenjang lembaga pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian kurikulum merupakan rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran yang terwujud dokumen tertulis dan sekaligus sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah dan di masyarakat, terdapat syarat utama dalam pemilihan bahan/materi pendidikan yaitu: 1) materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan, 2) materi harus sesuai dengan kebutuhan siswa.

Materi pelajaran dapat dibedakan menjadi: pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Pengetahuan menunjuk pada informasi yang disimpan dalam pikiran siswa, dengan demikian

pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa. Keterampilan menunjuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dengan cara yang kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. Sikap menunjuk pada kecenderungan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini kebenarannya oleh siswa.

5. Komponen Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Proses pendidikan berada dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Lingkungan ada dua macam, lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Lingkungan fisik yakni suasana dan keadaan berlangsungnya pendidikan. Lingkungan sosial yakni iklim dan suasana kependidikan.⁴² Siswa dengan berbagai potensinya akan berkembang maksimal jika berada dalam sebuah lingkungan yang kondusif. Iklim yang kondusif bagi pencapaian tujuan pendidikan adalah merupakan kurikulum tersembunyi bagi pencapaian tujuan pendidikan.

Iklim lingkungan kelas yang kondusif merupakan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik bagi proses pembelajaran. Iklim belajar yang menyenangkan akan membangkitkan semangat dan menumbuhkan aktivitas serta kreativitas peserta didik. Lingkungan kelas yang kondusif, nyaman, menyenangkan, bersih, dan rapi berperan penting dalam menunjang efektifitas pembelajaran.

6. **Komponen Alat Pendidikan**

Alat pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan, oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, maka disamping dibutuhkan pemilihan bahan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula.

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam prakteknya ada dua macam alat pendidikan. Pertama alat pendidikan dalam arti metode, kedua alat pendidikan dalam arti perangkat keras yang digunakan seperti media pembelajaran dan sarana pembelajaran.

Media pembelajaran memiliki peranan yang penting sebagai salah satu komponen pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses pembelajaran sebagai proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara maksimal. Menurut Omar Hamalik dalam bukunya *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, “media dalam proses belajar mengajar memiliki dua peranan penting: 1) media sebagai alat bantu mengajar, 2) media sebagai sumber belajar yang digunakan sendiri oleh peserta didik secara mandiri.”

Dengan adanya uraian komponen-komponen pendidikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memerhatikan komponen-komponen dalam pendidikan adalah sangat penting dilakukan karena adanya hubungan antara satu dengan yang lain dan membentuk suatu sistem, sebagai suatu sistem tentunya setiap komponen memberikan sumbangan bagi keberhasilan pengajaran sesuai dengan fungsi masing-masing.

B. Pendidik Sebagai Komponen Pendidikan

Pendidik merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh pendidik yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari pendidik dan berujung pada pendidik pula.

Fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Selain itu, pendidik dan pelaksana juga berfungsi sebagai pembimbing, pengaruh, untuk menumbuhkan aktivitas peserta didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Contohnya, pengalaman dalam mengajar, status resminya pendidik yang sudah di angkat atau tenaga sukarela dan tingkatan pendidikannya.

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Secara akademis, pendidik adalah tenaga kependidikan yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat pada lembaga tertentu yang berkualitas, seperti pendidik, dosen, tutor, fasilitator, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya.

Terdapat beberapa jenis pendidik yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja. Dilihat dari lembaga pendidikan, munculah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Pertama guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, kedua orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan ketiga pimpinan masyarakat baik formal maupun nonformal sebagai pendidik dilingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut yang termasuk kategori pendidik adalah sebagai berikut:

1. Orang Dewasa
2. Orang Tua
3. Guru Pendidik di Sekolah

Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu, kedudukan guru sebagai pendidik harus memenuhi persyaratan-persyaratan, baik persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan nilai dari tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap dan emosional. Persyaratan jabatan (profesi) terkait dengan pengetahuan

yang dimiliki, baik yang berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan, maupun cara penyampainnya.

4. Pemimpin Masyarakat dan Pemimpin Keagamaan

Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktifitas dari pemimpin tersebut dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan. kepada anggota masyarakat yang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik tampak pada aktifitas pembinaan atau pengembangan sifat kerohanian manusia, yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan.

Guru yang baik adalah mereka yang memberi suri tauladan kepada peserta didik tidak hanya mentransfer ilmu atau informasi saja, apalagi menganggap murid sebagai wadah yang terus menerus diisi dengan teori atau pengalaman. Idealnya seorang pendidik memiliki inovasi-inovasi untuk suksesi peroses belajar mengajar, melalui inovasi metode, teknik, hingga media-media yang dipakai untuk menjelaskan atau menarangkan materi didalam kelas. Dituntut kreatif dari pendidik bukan sesuatu yang tabu tapi melainkan tuntutan zaman dimana berubahnya pola fikir dan tingkah laku peserta didik membuat guru harus memikirkan inovasi dan kreasi dalam mengajar dan mendidik.

Guru berperan penting dalam menyukseskan generasi penerus bangsa. Saat ini dunia pendidikan di Indonesia sedang disibukkan dengan implemtasi Kurikulum Merdeka. Ke depan semua sekolah di Indonesia secara merata wajib mengikuti Kurikulum Merdeka. Ada beberapa sekolah yang dijadikan sampel untuk implementasi Kurikulum Merdeka tetapi sekolah lainyang

belum melaksanakan Kurikulum Merdeka seharusnya tetap menyisipkan inti dari implementasi dari Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum yang dilaksanakan di sekolahnya saat ini supaya ketika semua sekolah diwajibkan menggunakan Kurikulum Merdeka bisa lebih siap lagi.

Dinas pendidikan Kabupaten/Kota seharusnya mengadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua sekolah yang ada diwilayahnya sehingga semua guru bisa memahami dan melaksanakan yang ada didalam Kurikulum Merdeka. Bangsa yang cerdas tentunya di dalamnya wajib ada komponen-komponen pendukung pendidikan berkualitas.

